

BAB I

PENDAHULUAN

Problematika dalam Hubungan Internasional menurut penulis adalah hal yang sangat menarik untuk dikaji. Segala kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh sebuah negara pasti akan banyak mendapatkan respon dari berbagai pihak, baik itu respon positif maupun negatif. Dalam hubungan Internasional banyak sekali ditemukan kasus dimana sebuah negara atau rezim yang mempertahankan kepentingannya masing – masing guna mencapai tujuan strategisnya. Tidak sedikit yang bahkan sampai menimbulkan konflik berkepanjangan yang berpotensi merusak hubungan antar negara dengan negara atau negara dengan organisasi.

A. Alasan Pemilihan Judul

Konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan telah menjadi isu yang sangat kompleks dalam kawasan Asia Timur sejak tahun 50-an, konflik ini semakin parah ketika pihak Korea Utara mengembangkan program nuklirnya dan membuat senjata nuklir dalam rangka untuk melindungi negara dari ancaman negara – negara yang berbeda kepentingan dengan Korea Utara.

Setelah banyak melewati berbagai macam perundingan kedua negara ini belum juga menemukan hasil damai, gagalannya perundingan damai tersebut bisa dikatakan karena perilaku kedua negara yang dianggap mengancam keamanan rezim oleh masing – masing lawannya. Sebagai contoh, dengan adanya program

pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara, keputusan Korea Utara ini menjadi perhatian dari berbagai negara yang merasa bahwa program pengembangan tersebut dapat mengancam keamanan dan kestabilan regional di Asia Timur.

Untuk menekan dan mencoba mencari solusi dari konflik tersebut dibentuklah perundingan enam negara atau biasa disebut Six Party Talks sebagai bentuk program menuju denuklirisasi Korea Utara. Perundingan ini ternyata jauh dari berhasil dan bahkan sebagian besar selalu berujung kegagalan, program pengembangan nuklir Korea Utara semakin menjadi dan menyebabkan kekhawatiran banyak kalangan.

Konflik ini sangat menarik untuk dibahas karena telah menyita banyak perhatian dunia internasional, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat dan memaparkan judul tentang “ **Kegagalan Six Party Talks Dalam Menyelesaikan Krisis Nuklir Korea Utara** “

B. Latar Belakang Masalah

Program pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara dimulai pada tahun 1956 dimana Korea Utara menjalin kerjasama dengan Uni Soviet untuk menggunakan energi nuklir secara damai. Setelah ditandatangani perjanjian ini Korea Utara mengiriskan para ilmuwan dan teknisi terbaiknya menuju Uni Soviet untuk belajar dan mendapatkan pelatihan. Program ini diselenggarakan oleh Uni Soviet dalam rangka melatih para ilmuwan dan teknisi dari negara komunis lain¹.

¹ Uk Heo dan Jung-Yeop Woo, “The North Korean Nuclear Crisis :Motives, Progress, and Prospects,” Korea observer Vol.39, No.4, (The Institute of Korean Studies, winter 2008), hlm. 490.

Keadaan Korea Utara pada saat itu memang menuntut mereka untuk mengikuti pelatihan tersebut, karena pada saat itu memang Korea Utara belum mampu untuk mengembangkan nuklir apalagi memproduksi senjata nuklir sendiri tanpa bantuan negara lain.

Tahun 1965 ditandai dengan didirikannya Akademi Militer di Hamhung, disana para prajurit tentara Korea Utara mendapatkan pelatihan tentang pengembangan rudal². Pada tahun yang sama Uni Soviet juga memberikan bantuan secara besar – besaran kepada Korea Utara untuk mendirikan pusat penelitian di Yongbyon.

Fasilitas nuklir yang pertama kali dibangun adalah reaktor nuklir model Uni Soviet yang dioperasikan untuk tujuan penelitian semata. Reaktor tersebut memiliki daya sebesar 5MW yang dibangun di kawasan Yongbyon, tepatnya 100 Km utara Pyongyang. Reaktor ini sangat kecil sehingga tidak banyak menyita perhatian dunia internasional karena akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memproduksi Plutonium yang cukup untuk senjata nuklir. Fasilitas nuklir Yongbyon ini masih terfokus pada lingkaran penyulingan bahan bakar nuklir.

Dengan hadirnya fasilitas nuklir Yongbyon, Korea Utara mulai memperoleh Plutonium dan secara perlahan menguasai teknologi nuklir yang mendorong Kim Il Sung memutuskan untuk memproduksi senjata nuklir³. Bagi Korea Utara kepemilikan

² Joseph S. Bermudez, Jr., "A History of Ballistic Missile Development in the DPRK," Occasional Paper No. 2, (Center for Nonproliferation Studies, 1999), hlm. 2.

³ Jessica Kuhn, "Global Security Issues in North Korea, *Multilateralism in Northeast Asia*" https://digital.lib.washington.edu/researchworks/bitstream/handle/1773/15602/TF_SIS495J_2010corrected.pdf?sequence=3#page=31 Diakses pada 24/12/2016 Pukul 3:35, hlm. 38.

atas senjata nuklir akan membuat dirinya selangkah lebih maju dari Korea Selatan, selain itu tujuan utama Korea Utara adalah untuk menjaga keamanan dan kelangsungan rezim Korea Utara.

Pada dasarnya pihak Korea Utara menganggap bahwa Amerika Serikat adalah ancaman yang nyata dan serius, sedangkan Amerika Serikat juga menganggap Korea Utara adalah negara yang mendukung terorisme. Atas dasar tersebut Korea Utara menaruh perhatian khusus kepada program pengembangan nuklir nya dengan harapan hal ini dapat mencegah Amerika Serikat memprovokasi negara nya dengan ancaman militer.

Korea Utara memiliki pemikiran jika mereka memiliki senjata nuklir maka mereka akan memiliki posisi unggul dalam negosiasi, mereka meyakini bahwa selain dapat menjaga keamanan rezim nya, program nuklir tersebut juga dapat menghasilkan keuntungan ekonomi dalam bentuk berbagai macam variasi bantuan. Oleh karena bukan sesuatu yang berlebihan untuk mengatakan bahwa Korea Utara mengandalkan program pengembangan nuklir ini sebagai strategi inti agenda utama nasional⁴.

Korea Utara pada tahun 1980-an dicirikan dengan aksi – aksi yang bersifat permusuhan dan inisiatif mencurigakan, pada tahun ini Korea Utara dan Iran membangun sebuah kerjasama bilateral tentang nuklir dan rudal, kerjasama tersebut yang kemudian membuat kedua negara ini bekerjasama dalam bidang pengembangan

⁴ KBS. 2012. “Isu Nuklir Korea Utara” http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/faq_01.htm#7
Diakses pada 24/12/2016 Pukul 3:05

teknologi rudal. Rudal Korea Utara “ Taepodong II dan rudal Iran Shahab – 5 “ diketahui sebagai hasil kerjasama kedua negara tersebut. Secara jelas hal ini akan memberi dampak besar dalam perkembangan isu nuklir Iran dan Korea Utara⁵.

Akhir tahun 1980-an, Korea Utara mulai sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungannya dengan bantuan negara lain dalam hal melanjutkan program nuklirnya. Korea Utara mulai dapat secara mandiri memproduksi uranium dan membangun reaktornya sendiri.

Saat itu fasilitas rahasia pemisahan Plutonium berskala cukup besar berhasil dibangun di Yongbyon. Fasilitas ini mampu menghasilkan beberapa ratus ton bahan bakar dalam setahun, cukup untuk menangani bahan bakar dari seluruh reaktor. Keberadaan fasilitas ini ditemukan oleh Amerika Serikat yang kemudian menuduh Pyongyang telah membangun reaktor nuklir secara diam – diam.

Pada tahun 1982 satelit Amerika Serikat berhasil menangkap gambar yang menunjukkan adanya sebuah pembangunan di kawasan Yongbyon termasuk fasilitas dan pabrik pengelolaan nuklir baru yang meningkatkan perhatian Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang. Diketahui bahwa Korea Utara sedang membangun sebuah fasilitas nuklir baru yaitu reaktor nuklir yang berdaya 50MW.

Negara-negara ini mengetahui bahwa pabrik pengelolaan Plutonium juga berada ditempat yang sama sehingga Plutonium tersebut kemungkinan besar bisa digunakan untuk memproses bahan bakar nuklir dan kemudian digunakan untuk

⁵ Ada kecurigaan koneksi nuklir antara Iran dan Korut
http://rki.kbs.co.kr/indonesian/news/news_hotissue_detail.htm?No=32415&id=hotissue Diakses pada 24/12/2016 Pukul 4:20

mengembangkan senjata nuklir. Sejak saat itu, program nuklir Korea Utara menjadi perhatian keamanan yang serius bagi negara-negara sekitarnya termasuk Amerika Serikat.

Program pengembangan senjata nuklir Korea Utara dinilai berpotensi besar mengancam ketentraman dan stabilitas keamanan negara – negara internasional,. Amerika Serikat merasa berkewajiban dalam melakukan denuklirisasi di Korea Utara, hal ini terkait dengan kepentingan Amerika Serikat dalam menjaga proliferasi nuklir dunia, oleh karena itu Amerika Serikat mengajak Negara – Negara lain untuk ikut serta dalam program denuklirisasi Korea Utara.

Pada bulan April tahun 1984, Korea Utara melaksanakan uji coba rudal Scud-B yang pertama. Uji coba tersebut menimbulkan reaksi keras dari Uni Soviet yang menekan Korea Utara untuk bergabung dengan NPT (*Nuclear Non-Proliferation Treaty*)⁶ dan menandatangani perjanjian NPT dimana Korea Utara tidak akan menyebarkan nuklir. Mikhail Gorbachev menekan Kim Il Sung dengan mengancam bahwa Moscow akan menghentikan bantuan ekonominya.

Korea Utara akhirnya tunduk mengalah dan mendeklarasikan kepada IAEA (*International Atomic Energy Agency*) keberadaan fasilitas nuklir di Yongbyon. Korea Utara menandatangani perjanjian dengan IAEA untuk melaporkan keadaan program nuklirnya secara wajib kepada IAEA, dimulai pada Januari 1992. Sesuai dengan perjanjian itu, IAEA segera melakukan inspeksi di Korea Utara dan setelah

⁶ Lihat Lampiran

enam kali melakukan inspeksi IAEA menemukan bukti jejak bahwa beberapa kilogram Plutonium yang bisa membuat senjata nuklir pernah diekstraksi.

Berbeda jauh dengan laporan yang diberikan oleh Korea Utara, laporan mereka menuliskan bahwa mereka hanya mengekstraksi 90 Gram Plutonium dari fasilitas nuklirnya. Atas hasil inspeksi yang didapat tersebut, pihak IAEA meminta pemeriksaan khusus⁷. Setelah keputusan tersebut keadaan malah berubah menjadi kurang baik, Karena Korea Utara merasa mendapatkan tekanan yang bertubi – tubi akhirnya pada tahun 2003 Korea Utara keluar dari perjanjian Non-Proliferasi Nuklir⁸.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Amerika Serikat kemudian mengusulkan perundingan Six Party Talks yang nantinya akan melibatkan Korea Selatan, Korea Utara, Amerika Serikat, Jepang, China, dan Uni Soviet. Pada putaran pertama tahun 2003, diplomat Korea Utara menyatakan bahwa Pyongyang tidak memiliki pilihan selain mendeklarasikan kepemilikan senjata nuklir dan akan melakukan uji coba senjata nuklir.

Namun mereka juga mengatakan bahwa Pyongyang akan menghentikan program nuklirnya jika Amerika Serikat mau mengubah kebijakan permusuhannya, menghalangi pertumbuhan ekonomi Korea Utara, dan membantu kebutuhan energi Korea Utara. Hingga saat ini pertemuan antar Negara anggota Six Party Talks sudah beberapa kali dilakukan.

⁷ KBS. 2012. “Isu Nuklir Korea Utara” http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/faq_01.htm#7.
Diakses pada 24/12/2016 Pukul 4:25

⁸ Lihat Lampiran

Rincian kegiatan yang telah dilakukan yaitu, putaran pertama dilakukan pada bulan Agustus 2003 di Beijing. Dalam perundingan Six Party Talks yang pertama ini para petinggi dari keenam negara mulai berbicara tentang bagaimana Six Party Talks akan bertindak dalam menghadapi krisis nuklir Korea Utara. Penggunaan prinsip damai dan negosiasi dalam mengatasi krisis nuklir adalah pedoman yang akan selalu digaungkan dalam perundingan tersebut, walaupun perundingan putaran pertama tersebut belum mencapai kesepakatan namun setidaknya perundingan tersebut berhasil menajadi pemicu untuk menumbuhkan kepekaan para anggota lain.

Pada tanggal 25 - 28 Februari 2004 China memfasilitasi untuk melaksanakan perundingan Six Party Talks putaran kedua. Dalam perundingan tersebut banyak dibicarakan tentang resolusi damai dalam rangka menyelesaikan krisis nuklir yang saat itu mengancam stabilitas keamanan di regional Asia timur. Selain itu, disepakati juga bahwa tujuan umum dari perundingan Six Party Talks adalah untuk mewujudkan denuklirisasi di kawasan Asia timur⁹.

Perundingan Six Party Talks putaran ketiga dilaksanakan pada tanggal 23 – 26 Juni 2004. Dalam perundingan kali ini ada sedikit perbedaan pandangan dari pihak Korea Utara dan para anggota Six Party Talks lain nya. Korea Utara beranggapan bahwa yang dimaksud dari denuklirisasi adalah melucuti semua persenjataan yang berbasis nuklir tetapi tidak termasuk program pengembangan uranium.

⁹ The Second Round of the Six-Party Talks. http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/n_korea/6party0402.html
Diakses pada 28/12/16 pukul 3:20

Berbeda dengan Korea Utara negara anggota yang lain beranggapan bahwa program pengembangan uranium juga harus ikut serta dihentikan karena mereka khawatir akan timbulnya penyelewengan akan hasil dari uranium tersebut yang akhirnya kembali mengarah pada program nuklir. Sama seperti putaran kedua, putaran ketiga ini pun belum menghasilkan kemajuan yang berarti¹⁰. Perundingan ketiga ini justru membuat Korea Utara menolak hadir pada perundingan Six Party Talks pada bulan September 2004.

Putaran keempat kali ini diselenggarakan sedikit berbeda karena dilaksanakan dalam dua tahap di Beijing. Tahap pertama berlangsung sejak 26 Juli hingga 7 Agustus tahun 2005. Dan tahap kedua dilaksanakan sejak 13 – 19 September 2005. Pada pertemuan kali ini pihak dari Korea Utara kembali menegaskan bahwa mereka akan mematuhi deklarasi denuklirisasi Korea Utara tahun 1992 untuk tidak menerima dan menyebarkan senjata nuklir.

Putaran kelima Six Party Talks berlangsung pada 19 September 2005. Putaran kali ini diwarnai dengan peristiwa dibekukannya rekening Korea Utara oleh Amerika Serikat selaku Dewan keamanan PBB karena diduga bahwa uang tersebut adalah hasil pencucian uang. Akibat dari peristiwa tersebut Six Party Talks putaran kelima mengalami kemunduran hingga tahun 2006, dimana Korea Utara melakukan uji coba senjata nuklirnya ditahun yang sama.

¹⁰ Third Round of Six-Party Talks Concerning North Korean Nuclear Issues. http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/n_korea/6party/talk0406.html ” Diakses pada 28/12/2016 Pukul 3:27

Taepodong adalah senjata nuklir yang mempunyai daya jelajah cukup tinggi bahkan diperkirakan bisa mencapai Hawaii dan beberapa bagian Alaska¹¹. Perundingan Six Party Talks kembali bergulir pada bulan desember namun kembali tidak menghasilkan kesepakatan apapun, Amerika Serikat kemudian mengambil siasat untuk mengajak Korea Utara berdialog secara bilateral diluar perundingan Six Party Talks. Korea Utara setuju dan terjadilah pertemuan antara utusan Amerika Serikat dan Korea Utara di Berlin yang menghasilkan kesepakatan baru yang diresmikan pada tanggal 13 Februari saat perundingan Six Party Talks putaran kelima resmi berakhir.

Perundingan Six Party Talks putaran keenam dilaksanakan pada bulan Februari 2007. Perundingan ini membicarakan tentang rencana denuklirisasi dimana negara anggota yang lain memberi waktu sampai dengan 6 hari kepada Korea Utara untuk membekukan program pengembangan nuklir nya. Pyongyang pada akhirnya melaksanakan program denuklirisasi nuklir nya dengan melucuti senjata – senjata nuklir yang ada di Yongbyon.

Pada bulan Oktober Pyongyang telah menyetujui dan berjanji untuk menghentikan program pengembangan nuklir nya dengan imbalan bantuan dan koneksi diplomatik. Pada perundingan tahap kedua dikeluarkan dokumen Second Phase Actions for The Implementation of The Joint Statement¹², dimana Pemerintah

¹¹ North Korea's Nuclear Test and its Aftermath: Coping with the Fallout",
"http://www.nti.org/e_research/e3_north_korea_nuclear_test.html", Diakses pada tanggal 28/12/2016 Pukul 3:33

¹² Lihat Lampiran

Amerika Serikat dan Korea Utara berkomitmen untuk meningkatkan hubungan bilateralnya dan mengembangkan hubungan diplomatiknya¹³.

Setelah beberapa pihak mengupayakan denuklirisasi Korea Utara melalui Six Party Talks tetap saja sampai saat ini belum mendapatkan hasil seperti yang diharapkan, Six Party Talks dikatakan gagal karena Korea Utara masih mengembangkan nuklirnya dan melakukan serangkaian Uji coba nuklir yang dapat mengancam stabilitas kawasan maupun internasional.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan persoalan atau permasalahan mengenai, “ **Mengapa perundingan Six Party Talks gagal menyelesaikan krisis nuklir Korea Utara ?** “

D. Kerangka Teori

Teori muncul dan berkembang adalah karena telah melampaui pemikiran logis. Karena dengan logika, orang diajak untuk bisa berfikir benar. Mohtar Mas' oed dalam bukunya “ Ilmu Hubungan Internasional disiplin dan metodologi ” menjelaskan bahwa teori bukanlah dugaan. Teori adalah suatu bentuk pernyataan yang menjawab pertanyaan “mengapa”.

Artinya, berteori adalah upaya memberi makna pada fenomena yang terjadi. Pernyataan yang disebut teori tersebut berwujud sekumpulan generalisasi dan karena di dalam generalisasi tersebut terdapat konsep-konsep, bisa juga diartikan bahwa teori

¹³ Major Facts About Six Party Talks, “<http://english.peopledaily.com.cn/90001/90777/90851/6636560.html>”
Diakses pada 28/12/2016 Pukul 3:36

adalah pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis. Tapi, teori bukan sekedar kumpulan generalisasi, teori adalah pernyataan yang menjelaskan generalisasi tersebut. Sebagai sarana eksplanasi, teori adalah yang paling efektif. Teori juga membantu dalam mengorganisasikan dan menata fakta yang diteliti.

Menurut Krasner Rezim Internasional adalah sebuah kumpulan prinsip, norma, peraturan, dan prosedur pengambilan keputusan, baik secara eksplisit maupun implisit, demi menciptakan interaksi yang koheren antar-aktor internasional¹⁴. Prinsip merupakan keyakinan atas fakta, sebab, dan kebenaran.

Norma merupakan standar perilaku berdasarkan oleh hak dan kewajiban. Peraturan merupakan ketentuan maupun larangan spesifik atas suatu aksi. Prosedur pengambilan keputusan merupakan praktik yang berlaku untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan umum. Kepentingan rezim timbul karena adanya ketidakpuasan akan konsep dominan dari tata aturan internasional, kewenangan, dan organisasi¹⁵. Definisi rezim berbeda dengan definisi kerjasama terutama dengan definisi dari institusi.

Rezim merupakan contoh dari perilaku kerjasama dan upaya untuk memfasilitasi kerjasama, namun kerjasama dapat terjadi tanpa adanya rezim terlebih dahulu¹⁶. Perbedaan mendasar antara rezim dengan institusi adalah cara kedua hal ini

¹⁴ Krasner, Stephan D. 1982. *Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables*. Cornell University Press, hlm. 185

¹⁵ Haggard, Stephan dan Simmons, Beth A. 1987. *Theories of International Regimes*. *International Organization*, Vol. 41. Cambridge: MIT Press, hlm. 491

¹⁶ *Ibid*, hlm. 495

dalam memandang aktor-aktor dalam hubungan internasional terutama organisasi internasional.

Rezim mengacu pada pengaruh perilaku yang ditimbulkan dari organisasi internasional pada aktor-aktor yang lainnya, terutama aktor negara. Rezim berfokus pada ekspektasi aktor, berbeda dengan institusi yang lebih melihat kepada apa yang terjadi dalam organisasi daripada melihat pengaruh yang ditimbulkan organisasi internasional terhadap aktor-aktor lainnya¹⁷.

NPT (*Nuclear Non-Proliferation Treaty*) merupakan salah satu bentuk dari rezim non – proliferasi nuklir paling awal yang menindaklanjuti traktat mengenai pelarangan adanya uji coba senjata nuklir di udara, angkasa, maupun di bawah laut¹⁸. NPT kemudian menetapkan aturan mengenai kepemilikan senjata nuklir, baik bagi negara yang memiliki senjata nuklir juga bagi negara yang tidak memiliki senjata nuklir.

Negara yang memiliki senjata nuklir dilarang mendistribusikan senjata nuklir tersebut kepada negara-negara yang tidak memiliki nuklir. Selain itu, dalam NPT ini juga terdapat kesepakatan antar negara-negara yang memiliki nuklir seperti Amerika Serikat, Inggris, Rusia, China, serta Prancis untuk mengurangi kepemilikan senjata nuklir, hingga lambat laun dapat menghilangkan senjata nuklir tersebut dari muka bumi.

¹⁷ Barkin, J Samuel. 2006. *International Organization: Theories and Institutions*. New York:Palgrave Macmillan, hlm. 27

¹⁸ Jones, Rodney W. et al. 1998. *Tracking Nuclear Proliferation: A Guide in Maps and Charts*. Washington: Carnegie Endowment for International Peace, hlm. 15

Pada negara – negara non nuklir terdapat larangan untuk tidak menciptakan dan mengembangkan senjata nuklir. Sedangkan bagi negara-negara yang memiliki energi nuklir yang kemudian dimanfaatkan sebagai industri, teknologi, tenaga pembangkit atau untuk *Peaceful Nuclear Energy* diperbolehkan untuk mengembangkannya, namun kemudian harus bersedia untuk membuka negaranya akan adanya inspeksi-inspeksi dari IAEA (*International Atomic Energy Agency*), serta menaati aturan perlindungannya yaitu *IAEA Safeguards*.

Dalam teori efektifitas rezim menurut Alrid Underdal, suatu organisasi internasional atau biasa disebut rezim bisa dikatakan berhasil bilamana rezim tersebut berhasil melakukan fungsinya atau memecahkan masalah yang sedang dihadapi, khususnya adalah masalah yang menyebabkan rezim tersebut bisa berdiri. Untuk mengukur tingkat efektifitas sebuah rezim internasional dibutuhkan beberapa aspek analisis diantaranya adalah Problem Malignancy dan Problem Solving Capacity¹⁹.

1. Problem Malignancy

Efektif atau tidaknya sebuah rezim sangat ditentukan oleh seberapa malign atau rumit masalah yang sedang dihadapi oleh rezim tersebut, semakin rumit masalah yang dihadapi oleh rezim tersebut maka tingkat keefektifitasan rezim tersebut akan

¹⁹ Edward L. Miles, Arild Underdal, et al, (2002), *Environmental Regime Effectiveness : Confronting Theory with Evidence*, London: The MIT Press, hlm. 2

semakin kecil²⁰. Malignancy memiliki 3 karakter antara lain Incongruity, Asymmetry dan Cumulative Cleavages²¹.

Karakter pertama adalah Incongruity yang berarti adanya ketidaksepahaman antara anggota rezim yang menganggap bahwa isu yang diangkat bukan merupakan sebuah masalah. Kedua, Assymetri, yaitu adanya suatu kepentingan nasional yang berbeda – beda antara anggota dalam rezim tersebut. Ketiga, Cumulativ Cleavages, yaitu munculnya perbedaan antara anggota rezim internasional yang terakumulasi sehingga menimbulkan perpecahan.

2. Problem Solving Capacity

Menurut Underdal, permasalahan dapat diselesaikan dan diatasi apabila ditangani oleh lembaga atau sistem dengan power yang kuat serta didukung oleh adanya skill dan keterampilan yang memadai²². Setidaknya dalam Problem Solving Capacity terdapat tiga unsur yaitu:

- a. Pengaturan kelembagaan
- b. Distribusi kekuasaan
- c. Keterampilan dan energi yang tersedia untuk memecahkan masalah yang ada

Pengaturan kelembagaan menurut konsep dasar dalam ilmu sosial yang mengacu pada konstelasi hak dan aturan yang didefinisikan dengan praktek – praktek sosial,

²⁰ Pamuji Mugasejati & Ilien Halina, “Bahan Kuliah Rezim Internasional”, (2007) hlm 13.

²¹ Underdal, Arild. Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence <http://books.google.co.id/books?id=HkOFtdbSZL8C>, Diakses pada 8/1/2017 Pukul 2:45.hlm 18-27

²² Ibid. hlm. 23-37

pemberian peran dalam suatu agenda dan panduan dalam berinteraksi diantara mereka yang menempati peran – peran tersebut²³.

Distribusi kekuasaan adalah hal yang menyangkut pembagian kekuasaan yang adil dalam sebuah rezim dimana terdapat pihak dominan yang nanti dapat dijadikan sebagai leader namun tidak juga cukup kuat untuk mengabaikan peraturan, dan juga ada pihak minoritas yang cukup kuat untuk mengontrol pihak dominan²⁴, sehingga sebuah rezim atau organisasi benar – benar terlembaga secara baik.

Keterampilan dan energi yang tersedia pada suatu rezim atau organisasi dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang ada. Ada dua cara dalam pemberian tolak ukur keterampilan dan energi pada suatu rezim. Pertama, seberapa baik suatu peraturan dan implementasi memprediksi dan menjelaskan struktur dari masalah. Kedua, sejauh mana keterampilan dan usaha untuk melakukan perubahan yang signifikan terhadap suatu masalah. Dua pertanyaan tersebut dapat menjadi indikator keterampilan dan energi suatu rezim.

Krisis nuklir Korea Utara merupakan salah satu fenomena dalam Hubungan internasional yang menarik perhatian masyarakat global terutama Negara – Negara besar. Dinamika konflik Korea Utara yang semakin berkejolak setiap harinya mengundang hadirnya peran AS, Jepang, Korea selatan, China dan Rusia untuk menurunkan eskalasi krisis yang terjadi di Korea Utara.

²³ O. R. Young, "International Governance," Ithaca: Cornell University Press. (1994) hlm 3.

²⁴ Ibid

Six Party Talks menjadi salah satu forum multilateral yang dijadikan sebagai wadah bagi para actor internasional tersebut bernegosiasi tentang bagaimana cara mengatasi krisis yang sedang terjadi. Namun fakta yang terjadi setelah enam kali putaran Six Party Talks berjalan, forum belum menemukan titik temu atas masalah yang terjadi, dibawah ini penulis akan mencoba mengimplementasikan teori yang ada dengan fakta yang terjadi di lapangan dengan tujuan mengetahui apakah ada kesalahan atau kecacatan dalam tubuh Six Party Talks yang menyebabkan gagal nya perundingan tersebut.

Six Party Talks sebagai forum multilateral mempunyai peran penting dalam menyelesaikan krisis nuklir yang terjadi di Korea Utara. Hal ini sesuai dengan tujuan utama didirikannya forum untuk menciptakan stabilitas dan menyelesaikan krisis nuklir yang turut mengancam keamanan regional maupun global. Oleh karena itu, dalam operasional nya, Six Party Talks bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi Problem Malignancy dan Problem Solving Capacity, sebagaimana fungsi yang harus di jalankan oleh suatu rezim internasional seperti yang Alrid Underdal sampaikan dalam teorinya.

3. Problem Malignancy dalam Six Party Talks

Efektif apa tidaknya suatu rezim ditentukan dari seberapa kompleks masalah yang ditangani rezim tersebut. Semakin kompleks masalah maka semakin kecil tingkat keefektifitasan suatu rezim²⁵, dengan kata lain apabila suatu konflik atau

²⁵ Ibid

permasalahan bersifat malignancy (kompleks) maka kemungkinan untuk terciptanya kerjasama yang efektif juga akan semakin sulit.

Pada faktanya krisis nuklir yang terjadi di Semenanjung Korea cukup membuat pihak Six Party Talks kesulitan dalam upaya nya menjadi mediator pada krisis ini. Faktor – faktor tersebut adalah: Pertama, malignancy terletak pada AS yang mengambil kebijakan permusuhan kepada Korea Utara. Sejak pereundingan Six Party Talks putaran pertama Korut terus menekankan kepada AS untuk mencabut kebijakan permusuhan nya dan menuntut perjanjian non – agresi oleh AS, serta menghormati kedaulatan Korut, normalisasi hubungan Korut – AS, serta pencabutan sanksi embargo ekonomi kepada Korut adalah bukti nyata bahwa AS telah menghilangkan kebijakan bermusuhannya.

Korea Utara sebelumnya telah mengklaim bahwa walaupun Korea Utara sebenarnya telah memiliki niat untuk denuklirisasi, tetapi kebijakan permusuhan AS terhadap Korut telah memaksa pihak Pyongyang untuk memiliki kekuatan nuklir dalam rangka pertahanan nasional²⁶. Menurut ketua juru runding China, Wang Yi penghalang terbesar bagi perkembangan krisis nuklir adalah kebijakan AS terhadap Korut, dia pun mendesak agar AS bersifat lebih kooperatif dan kompromi dengan Korut²⁷.

²⁶ KBS World Radio “ Etalase Tentang Korea Utara”.
http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/archives/six-party/1st_round.htm?lang=i Diakses pada 8/1/2017
Pukul 3:17

²⁷ Ibid

4. Problem Solving Capacity dalam Six Party Talks

Problem Solving Capacity adalah suatu hal yang membicarakan efektifitas rezim yang diukur melalui Pengaturan lembaga, distribusi kekuasaan serta skill dan energi²⁸. Pengaturan lembaga dalam tubuh Six Party Talks memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektifitas kerjasama yang dijalin antar anggota. Aturan – aturan institusi yang kondusif, jelas, tegas dan adil sangat diperlukan dalam tubuh Six Party Talks untuk menjamin bahwa implementasi yang akan dilaksanakan oleh para anggota akan berjalan dengan semestinya.

Namun sangat disayangkan, sampai putaran keenam berakhir Six Party Talks belum mempunyai aturan – aturan yang menjamin pengimplementasian kesepakatan – kesepakatan oleh anggotanya. Khususnya dalam kasus krisis nuklir ini penulis melihat bahawa anggota Six Party Talks belum sepenuhnya paham akan tujuan sesungguhnya berdirinya forum multilateral Six Party Talks ini, selain itu belum juga ditemukan sebuah lembaga yang secara khusus menangani permasalahan pelanggaran – pelanggaran yang terjadi di dalam tubuh Six Party Talks.

Hal ini dapat dilihat dengan kerap absen nya Korea Utara dalam perundingan Six Party Talks namun tidak ada satupun anggota yang memberikan sanksi atau bahkan teguran kepada pihak Korea Utara.

Distribusi kekuasaan menyangkut pembagian kekuasaan yang adil dalam sebuah rezim dimana terdapat pihak dominan yang secara garis besar ditunjuk sebagai leader namun tidak cukup kuat untuk mengabaikan aturan yang ada dalam

²⁸ Ibid

forum tersebut, dan juga ada pihak yang berperan sebagai minoritas namun juga cukup kuat untuk mengontrol pihak dominan²⁹.

Dalam krisis nuklir Korea Utara yang ditangani oleh Six Party Talks penulis tidak melihat adanya sosok leader dalam forum tersebut, AS sebagai founding fathers tidak bisa memainkan secara bijak peran nya, AS cenderung bersifat arogan dengan bertahan pada kebijakan permusuhan nya kepada Korea Utara yang menyebabkan panas nya meja perundingan.

E. Hipotesa

Untuk memberikan jawaban sementara dari latar belakang yang sudah dijelaskan dan dihubungkan dengan permasalahan yang ada serta dikaitkan dengan kerangka dasar teori sebagai acuan, dimana akan dibuktikan lebih jauh pada bagian – bagian selanjutnya pada skripsi ini, maka penulis mengambil kesimpulan sementara bahwa kegagalan Six Party Talks dalam menyelesaikan krisis nuklir Korea Utara disebabkan oleh karena:

1. Krisis nuklir yang terjadi di Korea Utara merupakan krisis yang memiliki nilai malignancy yang besar sehingga sulit untuk diselesaikan.
2. Tidak adanya aturan legal yang mengikat secara hukum yang menekan anggota Six Party Talks dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada.

²⁹ Ilien Halina. 2012. *Efektivitas Rezim & Kerjasama Internasional. Handout Powerpoint*. hlm. 17.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penulis menentukan tujuan dari penulisan, Tujuan penulisan ini diharapkan dapat membantu menjelaskan krisis nuklir di Semenanjung Korea terutama pada periode tahun 2006 – 2009, membahas mengenai pengaruh dan dampak dari program pengembangan nuklir Korea Utara, menganalisa upaya Korea Utara dalam mengatasi hambatan – hambatan dalam pengembangan program nuklirnya, dan juga membahas pertemuan – pertemuan mengenai Six Party Talks yang diadakan oleh enam Negara dalam program denuklirisasi Korea Utara,

Selain itu juga, penulis berharap skripsi ini dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi mahasiswa, khususnya Program Studi Hubungan Internasional, bahwa keinginan suatu Negara dalam memiliki dan mengembangkan nuklir tidaklah mudah.

G. Metodologi Penelitian

Metode dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deskripsi analisis. Teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan adalah menggunakan pengumpulan data sekunder, yaitu berdasarkan pada data yang telah tersedia, Dalam perolehan data, penulis menggunakan studi pustaka atau Library Research yang mana data yang didapat berasal dari :

1. Buku – Buku
2. Jurnal

3. Majalah / Surat kabar
4. Artikel / data dari internet

H. Batasan Penelitian

Sebuah penulisan memerlukan adanya pembatasan. Pembatasan ini dimaksudkan agar pengungkapan masalah lebih fokus dan terarah. Penulisan ini mengambil jangkauan waktu tahun 2006-2009, karena pada tahun 2006 Korea Utara melakukan Uji Coba senjata jarak jauh Taepodong yang diperkirakan dapat menjangkau Hawaii dan beberapa bagian Alaska, hal ini secara langsung memberi perhatian dan banyak kekhawatiran dari banyak Negara.

I. Sistematika Penulisan

BAB I merupakan Bab Pendahuluan yang memuat Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Penulisan, Metode Penulisan, Jangkauan Penulisan dan Sistematika Penulisan

BAB II merupakan bab yang akan berusaha memaparkan mengenai dinamika krisis nuklir Korea Utara. Dengan adanya bab ini maka pada akan tergambar secara jelas dan rinci terkait duduk studi kasus yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini yaitu, krisis nuklir.

BAB III merupakan bab yang akan berusaha memaparkan mengenai forum Six Party Talks. Sebagai objek penelitian, penulis akan membahas secara terperinci

terkait segala hal yang menyangkut keberadaan forum tersebut beserta operasionalnya.

BAB IV merupakan bab yang akan penulis gunakan untuk memberikan analisa pembuktian hipotesa yang telah terpapar sebelumnya yaitu menyangkut kegagalan forum Six Party Talks dalam perspektif Teori Efektifitas Rezim Internasional.

BAB V merupakan Bab penutup yang akan berusaha memaparkan Kesimpulan dari keseluruhan bab sebelumnya.